IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN MARGASARI KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG

**Gugi Gustendi**

**NPM : 158010048**

Magister Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik

Pascasarjana Universitas Pasundan

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu implementasi kebijakan PIPPK yang dinilai masih belum optimal. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya dimensi-dimensi implementasi kebijakan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kelurahan Margasari Kota Bandung. Pendekatan dalam penelitian ini tentang implementasi kebijakan dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah ilmu administrasi publik.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Beberapa alasan memilih metode ini yaitu pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan dan yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan PIPPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis. Selain itu, faktor pendukungnya adalah adanya pemerataan pembangunan, dukungan anggaran sebesar 100 juta bagi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna, serta adanya penyiapan instrument pedoman teknis. Sedangkan Faktor Penghambat antara lain yaitu adanya perbedaan pola pikir di antara diantara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari, masih minimnya penyerapan anggaran, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga kewilayahan di lingkungan Kelurahan Margasari.

Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan PIPPK di Kelurahan Margasari sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III.

**Kata kunci : implementasi kebijakan, PIPPK, Kebijakan Inovasi**

**PENDAHULUAN**

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah

Kota Bandung meluncurkan PIPPK yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung.

Selain itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Peran aktif Pemerintah Daerah dalam menyikapi fenomena ini sangatlah strategis dengan menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program/kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan juga merubah pola pikir masyarakat. Upaya terpadu diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kehidupannya serta membantu dan memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi masing-masing masyarakat, sehingga jangan hanya dijadikan sebagai sebuah objek pembangunan, tetapi juga harus dapat menjadi subjek dari pembangunan tersebut. Adapun masyarakat dikatakan sebagai subyek, dimana peran dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memaksimalkan tujuan pembangunan itu sendiri dan dapat mengarahkan pembangunan tepat sasaran serta menjadi kunci utama dari keberhasilan pembangunan. Kerjasama dan koordinasi serta sinergitas dapat tercipta antara masyarakat dengan pemerintah secara baik, dengan melihat apakah masyarakat telah memiliki kemampuan berperan aktif dalam sebuah proses pembangunan, karena kemampuan berperan aktif merupakan hal yang sangat mendukung keberhasilan sebuah proses pembangunan.

Menurut George C. Edward III yang dikutip oleh Widodo dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (1980:79), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi sebagai berikut, yaitu :

1. Komunikasi, Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.
2. Sumber daya, sumber daya itu dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya : sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi, dan juga sumber daya kewenagan.
3. Disposisi atau sikap, merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi, mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap daerah masing-masing. Sebagai wujud dari pengaturan daerah, setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia seakan berlomba-lomba untuk melakukan pengaturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktifitas masyarakat umum serta sebagian besar berpengaruh terhadap pemberdayaan kewilayahan di suatu kota. Selain itu juga dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat melakukan inovasi dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Yang mana inovasi daerah disini berarti semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung sebagai daerah otonom memiliki Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) untuk mengoptimalkan tugas, peran dan fungsi aparat serta pemberdayaan masyarakat Kota Bandung berbasis kewilayahan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung nomor 436 Tahun 2015 tentang PIPPK. Dengan semangat desentralisasi, inovasi dan kolaborasi, berbagai program pembangunan akan diamanatkan kepada setiap kelurahan yang ada di wilayah Kota Bandung berdasarkan kebutuhan masing-masing kelurahan atas dasar kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh masyarakat Kota Bandung.

PIPPK Kota Bandung dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui RW (Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Lembaga Karang Taruna, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) serta kelurahan dan kecamatan. Perencanaan dilakukan oleh RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM bersama dengan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan. Setelah disetujui, program dan kegiatan akan dikelola oleh Camat selaku Pengguna Anggaran dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Seiring kegiatan berjalan, Camat dan Lurah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota. Keseluruhan proses ini akan diawasi oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal (masyarakat).

PIPPK merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan, mengingat kecamatan memiliki wilayah yang luas, jarak gestur politik, jumlah penduduk dan potensi yang dimiliki. Pemerintah kecamatan memiliki tiga fungsi utama, yaitu model program sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien untuk senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat, sebagai arena pengembangan kehidupan ekonomi kerakyatan dan sebagai arena pengembangan demokrasi di tingkat kota untuk pengambilan keputusan politik.

Program dan kegiatan yang dikelola oleh kecamatan dan kelurahan ini untuk pembiayaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Bandung yang tersedia sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk setiap RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM se-Kota Bandung. Gambaran Umum Pagu Indikatif PIPPK diuraikan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW (jumlah RW 1.584 x Rp 100.000.000,00) = Rp 158.400.000.000,00)
2. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK (jumlah PKK 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00).
3. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM (jumlah LPM 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00)
4. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna (jumlah Karang Taruna 151 x Rp 100.000.000,00) = Rp 15.100.000.000,00)

Total Pagu APBD Kota Bandung untuk pelaksanaan PIPPK tahun anggaran 2016 adalah Rp 203.700.000.000,00 Dana ini diberikan sebagai stimulan kepada masyarakat untuk dapat membangun wilayahnya masing-masing. Dengan adanya dana stimulan ini diharapkan masyarakat juga dapat memberikan sumbangsih bagi kewilayahannya berupa tenaga, materi, ataupun bentuk lainnya.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian awal yang peneliti lakukan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Bandung, ditemukan beberapa indikator-indikator masalah yang berkaitan dengan tingkat implementasi kebijakan PIPPK yang belum optimal, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dimensi komunikasi yang masih rendah. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang belum tahu mengenai program PIPPK yang dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Bandung.
2. Dimensi sumber daya yang belum maksimal. Hal ini dikarenakan peran ketua Rukun Warga yang belum optimal dikarenakan berstatus sebagai pegawai aktif. Sehingga hanya memiliki waktu luang di hari Sabtu dan Minggu, selain itu juga aparat kelurahan yang hanya dapat meluangkan waktunya di hari kerja (Senin-Jumat) karena libur di hari Sabtu dan Minggu. Sehingga belum ada sinkronisasi pelaksanaan PIPPK terkait dengan waktu pelaksanaan.Hal ini tentunya berdampak terhadap realisasi PIPPK di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Bandung yang belum mencapai 100%.
3. Dimensi birokrasi yang belum efektif, hal ini dikarenakan masih ada aparat kelurahan di lingkungan Kelurahan Margasari yang belum tau terkait dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PIPPK termasuk cara untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan. Selain itu juga dikarenakan kurang baiknya interaksi antara aparatur kelurahan dengan para ketua Rukun Warga.

**LANDASAN TEORI**

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. George C. Edward III mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157)

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Infromasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengkur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

1. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi di tengah jalan.
2. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats)* harus jelas dan tidak membingungkan  atau tidak ambigu/mendua.
3. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
4. Sumber daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources)*.Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People”.* Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : *“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”.* Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan.

“Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi”. (Tachjan, 2006:135).

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats)*. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
3. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.
4. Fasilitas, Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil
5. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) mengemukakan ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
2. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
3. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

1. Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair).*
2. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik  yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
3. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
4. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
5. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
6. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika strukur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

**METODE PENELITIAN**

**Tipe Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Pada penelitian ini, setelah peneliti mengumpulkan data dalam bentuk hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi maka untuk selanjutnya data tersebut akan dianalisis lebih mendalam lagi sehingga membentuk suatu kesimpulan ilmiah-alamiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan,

Beberapa alasan memilih metode ini yaitu: pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak (kompleks/heterogen). Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan dan yang ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi

**Unit Analisis**

Unit analisis dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari beberapa aparatur kelurahan, RW, PKK, dan Karang Taruna

**Teknik dan Instrument Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi dengan Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung secara langsung baik terhadap lembaga/institusi maupun individu. Data-data yang dijaring, dikodifikasikan dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan menggunakan memoing (membuat memo) untuk mencatat ide-ide, pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang akan muncul sewaktu-waktu saat peneliti berada di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan sebagai dokumen resmi dan literatur-literatur yang lain, yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini.

Selain itu, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi lapangan *(field research)* melalui metode wawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan studi literatur.

**Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara data penelitian yang telah dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, dokumen-dokumen pendukung, kemudian diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat

**HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan data Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, ada beberapa jenis kegiatan dalam PIPPK yang dilakukan di tingkat RW di Lingkungan Kelurahan Margasari. Antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan RW di lingkungan Kelurahan Margasari;
2. Pelatihan kader pemberdayaan pasyarakat dan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Kelurahan (P3MK);
3. Pendataan profil kelurahan;
4. Perhitungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan PIPPK;
5. Pendataan potensi ekonomi kelurahan;
6. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
7. Gelar pemberdayaan masyarakat.

Oleh Karena itu, Peneliti melakukan wawancara, observasi dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan atau implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edwards III, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat dimensi tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Pemberdayaan masyarakat yang semula merupakan paradigma yang sering digunakan oleh lembaga kemasyarakatan, sekarang secara formal telah dijalankan oleh jajaran birokrasi, sehingga hampir semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta *stakeholder* terkait lainnya telah melaksanakan program/kegiatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan dilaksanakannya PIPPK, pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat, dalam hal ini lembaga kemasyarakatan (RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM), yang selama ini terlibat langsung dalam proses pembangunan termasuk mendorong dan menumbuh-kembangkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

**PEMBAHASAN**

1. Implementasi Kebijakan PIPPK Dimensi Komunikasi

Transmisi/distribusi informasi dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini telah dilakukan dengan baik. Penyaluran informasinya telah didasarkan kepada peraturan yang berlaku maupun juga petunjuk teknis yang menjadi dasar dalam mengimplementasikan PIPPK.

Selain itu, mengenai kejelasan informasi mengenai implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung sudah tersampaikan dengan cukup jelas. Setelah aparatur kelurahan menyampaikan langsung kepada ketua RW, maka ketua RW akan langsung menyampaikan kepada warga melalui rembug warga, kemudian setelah itu dilanjutkan di musrenbang tingkat Kelurahan dan tingkat Kecamatan dengan sistem e-musrenbang.

Sedangkan konsistensi terkait dengan implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun masih ada sebagian masyarakat khususnya di tingkat RW yang kurang mengerti atau memahami perintah maupun informasi yang diberikan.

1. Implementasi Kebijakan PIPPK Dimensi Sumber Daya.

Kelurahan Margasari sudah memiliki staff maupun pegawai yang kompeten dan mau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta melayani masyarakat dengan sepenuh hati, meskipun hal tersebut harus dilakukan secara langsung yaitu terjun ke Lapangan.

Selain itu, wewenang formal dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung secara garis besar dilaksanakan oleh Aparatur Kelurahan Margasari dengan memberdayakan seluruh elemen kelurahan yang ada seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembina Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan juga Masyarakat.

Selain itu juga, terkait kejelasan infomasi dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung disampaikan dengan cara rembug warga kemudian lebih jelasnya lagi disampaikan saat musrenbang.

Sedangkan Fasilitas yang mendukung dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung cukup mendukung walaupun ada beberapa kekurangan seperti yang ada meja dan lemari di ruang serbaguna. Selain itu juga implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung juga sedikit terhambat dengan tidak adanya belanja modal di tahun ini.

1. Implementasi Kebijakan PIPPK Dimensi Disposisi.

Pengangkatan pegawai (birokrat) yang sesuai dengan prosedur dengan didasari oleh landasan hukum yang jelas. Selain itu juga petugas dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung Melibatkan PKK, Karang Taruna, LPM, dan RW

Selain itu, untuk pengelolaan insentif sudah dijalankan dengan baik oleh Aparatur Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Namun jumlah pemberian insentif setiap bulannya belum menentu sehingga perlu adanya pertimbangan untuk melakukan perbaikan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pemberian insentif setiap bulannya.

1. Implementasi Kebijakan PIPPK Struktur Birokrasi.

Standar operasional prosedur dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis dan prosedur yang berlaku. Hanya saja terkadang program kegiatan dalam PIPPK belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah.

Sedangkan, fragmentasi dalam implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung sudah dilakukan secara merata oleh Aparatur Kelurahan. Yaitu dengan melibatkan setiap lembaga-lembaga di tingkat wilayah seperti karang taruna, PKK, dan LPM. Namun perlu adanya peningkatan koordinasi antara aparatur kelurahan dengan lembaga di tingkat wilayah agar pelaksanaan kebijakan PIPPK dapat berjalan lebih baik di masa yang akan datang.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Margasari Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sudah berjalan dengan cukup optimal, tetapi belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III yang didasarkan pada empat dimensi. Yaitu yang pertama adalah dimensi komunikasi dimana distribusi informasi telah tersampaikan dengan cukup baik, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan sudah cukup jelas, juga akurasi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan sudah tepat dan cukup konsisten.

Dengan demikian terkait fasilitas yang kurang lengkap dikarenakan tidak adanya belanja modal selama dua tahun terakhir dan anggaran hanya diberikan dalam bentuk program kegiatan kiranya perlu disiasati dengan alternatif-alternatif lain misalnya bersumber dari swadaya masyarakat atau mencari sponsor dari pihak swasta yang tertarik untuk mendukung pelaksanaan PIPPK di lingkungan Kelurahan Margasari.

**REFERENSI**

**Abidin. Said Zainal. 2004. Cetakan Kedua. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.**

Agustino. Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Agustino. Leo. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

Dunn, W. N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua* (terjemahan Samodra Wibawa, Diah Asita dani, Erwan Agus Purwanto). Gadjah mada University Press.

**Fatih, Andy Al. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.**

**Fermana, Surya. 2009. *Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.**

Hardiyansah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.

**Herdianyah. Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.**

**Islamy. M. Irfan. 2002. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Cetakan Kesebelas Bumi Aksara**

**Keban. Yeremias. T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.**

**Lexy Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* *(Edisi Revisi)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.**

**Lubis. Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.**

**Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: PMN.**

**Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Pustaka Pelajar.**

**Nugroho. Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.**

**Parsons, Wayne. 2001. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.**

**Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.**

Poerwandari K. 2007. „Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia‟. Lembaga

Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Samodra, Wibawa.,Yuyun . P dan Agus P. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: Raja Grafindo Persada

**Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.**

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D. Jakarta: Univeritas Indonesia.

**Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.**

**Thoha, Miftah. 2011*. Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer.* Jakarta: Kencana.**

**Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.**

**Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.**